



Upaya Pemerintah Turki dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Psikotropika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)”.

Miftahul Khausar¹, Steve Ariel Harutogu² dan Muhammad Sya’roni Rofii³

“Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia”^{1 2 3}

Email: miftahul.khausar@ui.ac.id, steve.ariel@ui.ac.id dan muhammadsyaroni@ui.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received : 07-06-2021

Revised : 15-06-2021

Approved : 21-06-2021

Abstract:

This paper will be discussing about the presence of Transnational Organized Crime (TOC) which runs on cross-border drug trafficking as an impact of globalization and trade liberalization, also attempt to connect the world as one channel, appears to produce contemporary issues, which happen around the world, and Turkey itself. It will also elaborate the attempts of Turkish government to eradicate the TOC. The aim of this research is to identify and examine the effectiveness the interaction of Turkish government and TOC. Research method will be using the qualitative research method with previous articles and reports as the reference. On the discussion the paper will divide into 3 section which elaborate the TOC threat as a world threat, the development of drugs trade in Turkey, and The attempts, programs, and bilateral cooperation made by Turkey in response of the drug trafficking. It also try to understand Turkey contemporary geographical problem, being the ‘hub’ of the supplies and demands drugs world. And to know several big actors behind almost all of the drug trafficking activities in Turkey.

Keywords:

(turkey government; transnational organized crime; drugs and narcotics).

Abstrak:

Jurnal ini akan membahas mengenai kehadiran dari Kejahatan Transnasional Terorganisir yang bergerak di bidang perdagangan narkoba lintas negara sebagai dampak dari globalisasi, dan liberalisasi perdagangan, juga upaya dari menghubungkan dunia sebagai suatu kanal/saluran, yang menghasilkan suatu permasalahan kontemporer, yang terjadi di dunia, dan juga Turki. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah Turki dalam membasmi Kejahatan Transnasional Terorganisir. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menguji efektivitas interaksi pemerintah Turki dan Kejahatan Transnasional Terorganisir. Metode penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian dan laporan terdahulu sebagai rujukan. Pada pembahasan, artikel akan membagi menjadi 3 bagian yang menjelaskan tentang ancaman Kejahatan Transnasional Terorganisir sebagai ancaman dunia, perkembangan perdagangan narkoba di Turki, dan upaya, program dan kerjasama bilateral yang dilakukan Turki sebagai reaksi atas perdagangan narkoba. Dan juga penelitian ini berusaha untuk memahami masalah geografis kontemporer Turki, yang menjadi sebuah jembatan permintaan dan penawaran dari dunia narkoba. Juga untuk mengetahui beberapa aktor terbesar yang mendalangi hampir semua aktivitas perdagangan narkoba di Turki.

Kata Kunci:

(pemerintah turki; kejahatan transnasional terorganisir; obat-obatan terlarang dan narkotika).

Corresponden author: Miftahul Khausar

Email: miftahul.khausar@ui.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA 2021



Pendahuluan

Ketika perang, migrasi, dan dinamika lainnya membentuk kembali politik dan keamanan di Timur Tengah dan Eropa, Turki telah menjadi negara jembatan dalam banyak hal dari negara-negara kedua wilayah tersebut ([Athanassopoulou, 2005](#)) Karena itu, Turki memiliki peranan yang penting dan signifikan. Namun, disisi lain Turki juga harus berhadapan dengan berbagai tantangan yang ada seperti salah satunya menjadi jalur transaksi Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) yaitu perdagangan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) antara negara secara ilegal. Hal tersebut merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang menimbulkan ancaman dan risiko keselamatan publik, keamanan nasional, dan bahkan keamanan Internasional ([Mittleman & Johnston, 1999](#)). Oleh karena itu tulisan ini akan lebih dalam mengulas tentang upaya-upaya penanganan masalah kejahatan transnasional yang diambil oleh Turki.

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, maka diciptakan mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional ([Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, 2019](#)). Dalam perkembangannya istilah Kejahatan transnasional melekat kepada segala kejahatan yang bersifat mengancam sehingga perdagangan senjata ilegal, migrasi ilegal dan organisasi kejahatan internasional sekarang diterima sebagai ancaman global utama dan dikategorikan kedalam Kejahatan Transnasional Terorganisir karena bersifat lintas negara ([Ekici, 2014](#)).

Kejahatan Transnasional Terorganisir telah menjadi perhatian serius bagi seluruh komunitas global. Era globalisasi telah mengubah dunia menjadi tatanan sosial baru yang ditandai dengan pergerakan barang dan faktor produksi yang tidak dibatasi di sepanjang perbatasan negara. Globalisasi masyarakat dan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah memberikan berbagai peluang tidak hanya bagi kemakmuran masyarakat Turki, tetapi juga bagi dunia kriminal ([Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2021](#)). Dengan adanya fenomena ini, Kejahatan Transnasional Terorganisir telah menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan ini telah menjadi salah satu ancaman non-militer teratas terhadap keamanan dan stabilitas internasional sejak akhir Perang Dingin.

Kejahatan Transnational Teorganisir dalam segala bentuknya, memiliki ancaman

serius terhadap kesehatan, keamanan dan kesejahteraan manusia, dan berdampak buruk pada fondasi ekonomi, budaya dan politik masyarakat pada sebuah negara. Hal itu menyebabkan pengikisan keuntungan-keuntungan yang telah diperoleh dengan hasil dari pembangunan, destabilisasi tatanan sosial-ekonomi, rusaknya tatanan moral dan sosial masyarakat, serta merusak kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu kejahatan paling berbahaya adalah perdagangan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) antara negara secara ilegal karena memiliki dampak bukan hanya ke perekonomian negara tetapi juga pada kesehatan, tatanan moral dan sosial pada masyarakat. Kejahatan jenis ini juga merupakan ancaman yang besar bagi Turki yang secara geografis menjadi jembatan segala aktivitas dua wilayah besar yaitu Eropa dan Timur Tengah.

Karena, memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir merupakan salah satu tantangan utama bagi komunitas internasional. Kejahatan ini merupakan bagian dari serangkaian tantangan keamanan baru yang kompleks. Ini membutuhkan pendekatan multi-disiplin untuk masalah yang Turki hadapi. Meskipun penegakan hukum merupakan tanggung jawab utama negara-negara yang berdaulat, perkembangan kejahatan menjadi semakin global. Dengan demikian, Kejahatan Transnasional Terorganisir membutuhkan respon internasional yang terkoordinasi dan kerjasama regional yang erat ([Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs](#), 2021).

Salah satu faktor kunci di balik eskalasi Kejahatan Transnasional Terorganisir baru-baru ini adalah runtuhnya Blok Timur pasca Perang Dingin, khususnya Uni Soviet, yang menyebabkan munculnya negara-negara baru dengan kekosongan kekuasaan dan kontrol perbatasan yang lemah, berhasil memfasilitasi mobilitas penjahat transnasional ([Toktas & Selimoglu](#), 2012). Selain itu, kejahatan telah mengglobal oleh kemajuan peradaban seperti perkembangan teknologi informasi, penerbangan dan komunikasi, dan oleh internasionalisasi sistem moneter dan perbankan, yang relatif lebih mudah dan cepat untuk memindahkan orang, barang dan modal lintas perbatasan. Selain itu, kontrol perbatasan dan bea cukai yang longgar, pasar yang mudah diakses, privatisasi skala besar, ketiadaan perlindungan hukum, kesenjangan kewenangan dan ketiadaan mekanisme penegakan hukum semuanya dianggap sebagai alasan lebih lanjut dalam kemunculan dan keberlanjutan kejahatan ini ([Toktas & Selimoglu](#), 2012).

Berangkat dari Penjelasan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan berusaha dijawab oleh peneliti adalah Bagaimana Upaya Turki Dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir yaitu “Perdagangan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)” ?

Tulisan ini akan berfokus pada negara Turki yang secara geografis menjadi tempat transit antara Timur dan Barat. Turki telah menjadi salah satu rute yang dilalui kelompok kejahatan terorganisir untuk mengangkut barang-barang terlarang dalam hal ini akan lebih fokus membahas perdagangan ilegal narkoba. Tulisan ini juga akan menjelaskan tindakan apa saja yang diambil oleh negara Turki untuk menyelesaikan permasalahan Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen yang berupa himpunan artikel, jurnal, dan laporan terdahulu dari lembaga maupun institusi yang mumpuni. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang berfokus pada mengaitkan interpretatif, pendekatan alamiah kepada suatu subjek. Dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada posisi alamiahnya, dan berupaya dalam mengaitkan suatu fenomena menjadi sesuatu yang masuk akal, atas hasil penggabungan setiap unsur yang muncul pada suatu peristiwa. Penelitian kualitatif menggunakan kumpulan bukti empiris yang berasal dari studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, yang dapat menjelaskan suatu permasalahan dalam penelitian (Denzin & Lincoln, 1994).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis kepastakaan. Metode ini menggunakan sumber penelitian terdahulu sebagai rujukan seperti sumber buku, karya, tulisan, yang terdapat di perpustakaan, dan juga sumber resmi lainnya yang berasal dari lembaga atau institusi yang kredibel yang terjamin kemurniannya, keabsahannya, dan keasliannya (Yusuf, 2014). Peneliti menggunakan sumber-sumber dari lembaga resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pernyataan resmi dari pemerintah Turki, dan juga jurnal atau artikel terdahulu yang membahas mengenai persoalan yang diteliti saat ini.

Dalam mengidentifikasi peranan setiap variabel dalam penelitian, peneliti akan membagi objek penelitian menjadi 3, yaitu aktor, tempat, dan aktivitas (Yusuf, 2014). Aktor yang menjadi titik fokus peneliti adalah pemerintah Turki sebagai entitas yang memproduksi kebijakan dalam pemberantasan perdagangan narkoba, dan salah satu organisasi transnasional yang bergerak dalam bidang perdagangan narkoba yaitu Partai Pekerja Kurdistan. Tempat yang menjadi fokus penelitian adalah negara Turki yang menjadi *epicentrum* dari jalur perdagangan narkoba, serta negara sekitar yang menjadi wilayah perjalanan dari / ke wilayah yang menjadi titik permintaan / penawaran dari perdagangan narkoba seperti Belanda dan Inggris sebagai negara yang menjadi pihak permintaan, dan Afghanistan, Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara yang menjadi pihak penyedia / penawaran. Aktivitas yang akan diteliti adalah bagaimana upaya Turki dalam melakukan implementasi kebijakannya dan sejauh mana keberhasilan Turki dalam menurunkan tingkat perdagangan narkoba ilegal di negaranya. Dan juga akan menjelaskan mengenai mekanisme internal sistem perdagangan narkoba ilegal yang difasilitasi oleh Partai Pekerja Kurdistan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)” sebagai Ancaman Dunia

Secara umum fenomena perdagangan narkoba memiliki tiga unsur yang maknanya berbeda, namun saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, masalah narkoba dapat dianggap sebagai ancaman yang memiliki dampak tiga kali lipat untuk dapat dipertimbangkan di bawah topik produksi, perdagangan dan konsumsi ilegal.

Tidak dapat dinafikan bahwa keberadaan beberapa keterkaitan organik yang memungkinkan kita berpindah dari satu topik ke topik lain di antara elemen-elemen yang pada dasarnya terpisah ini. Intinya, jika tidak ada produksi ilegal, tidak akan ada perdagangan ilegal, dan jika tidak ada perdagangan ilegal maka secara alami tidak akan ada permintaan untuk narkoba. Oleh karena itu, ketiadaan permintaan tidak akan meningkatkan penawaran (Özgül, 1999).

Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap atau ilegal yang terjadi bahkan hingga tingkat global yang melibatkan pembudidayaan, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat yang tidak sesuai dengan undang - undang larangan narkoba. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* terus melakukan pemantauan pergerakan perdagangan narkoba internasional agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang perkembangan pasarnya ditingkat global. Merujuk data yang dirilis oleh UNODC, Saat ini, tingkat konsumsi heroin global mencapai 340 ton dan rata-rata sitaan pertahun diangka 430 - 450 ton heroin dari pasar heroin global. Dari total itu, beberapa sumber juga terdata bahwa komoditas opium terbesar diproduksi di negara Myanmar dan Republik Demokratik Rakyat Laos yang memproduksi sekitar 50 ton, Lalu sisanya, sekitar 380 ton heroin dan morfin, diproduksi secara eksklusif dari opium Afghanistan. Sementara sekitar 5 ton dikonsumsi dan disita di Afghanistan, 375 ton sisanya juga di perjual belikan di seluruh dunia melalui rute yang mengalir menuju dan melalui negara-negara sekitar Afghanistan (*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020*).

Selain itu, jaringan penyelundupan dan perdagangan narkoba ilegal lebih memilih untuk menggunakan Turki sebagai negara transit dalam mengimpor bahan-bahan terlarang, hal ini disebabkan oleh jaringan tersebut dapat melakukan perjalanan jarak jauh tanpa melintasi perbatasan apa pun dan karena daratan Turki terletak seperti sebuah jembatan antara negara-negara produsen bahan ilegal di Timur dan konsumen di Barat. Rute penyelundupan utama melewati Turki, Bulgaria, Rumania, Makedonia, Austria dan Republik Ceko atau Slovakia ke Jerman atau Austria. Rute kedua terfavorit dimulai dari Timur Tengah dan melewati Turki, Bulgaria, Yunani, Makedonia, Albania dan Italia menuju Eropa Tengah dan Barat. Rute terakhir pergi dari Timur Tengah melalui Turki ke Eropa Selatan dan Barat. Pelintas perbatasan ilegal membidik tujuan di negara-negara Eropa Timur dan Barat, terutama Austria dan Jerman. Pintu masuk penyelundupan ilegal melewati perbatasan timur Turki dengan Armenia dan Georgia, Iran, Irak, dan Suriah. Penyelundup dengan demikian kebanyakan masuk ke Turki melalui provinsi seperti Ig̃dir, Kars, Ardahan, Dog̃u Beyazıt, Artvin, Ag̃rı, Van, Hakkari, S,ırnak, S,anlıurfa, Hatay, Adana dan Gaziantep. Titik keluar yang paling disukai adalah Antalya, Mug̃la, Aydın, Bodrum, Izmir, Balıkesir, Edirne dan Istanbul (*Toktas & Selimoglu, 2012*).

Rute Balkan dan Utara adalah koridor utama perdagangan heroin yang menghubungkan Afghanistan dengan pasar besar Federasi Rusia dan Eropa Barat. Rute Balkan melintasi Republik Islam Iran (Iran) (seringkali melalui Pakistan), Turki, Yunani dan Bulgaria melintasi Eropa Tenggara ke pasar Eropa Barat, dengan nilai pasar

tahunan sekitar \$ 20 miliar. Rute utara terutama melalui Tajikistan dan Kyrgyzstan (atau Uzbekistan atau Turkmenistan) ke Kazakhstan dan Federasi Rusia. Ukuran pasar itu diperkirakan mencapai \$ 13 miliar per tahun (Toktas & Selimoglu, 2012).

Masifnya pergerakan perdagangan narkoba ilegal tersebut tentu sangat mengancam seluruh negara di dunia termasuk Turki. Perjuangan melawan narkoba yang hanya didasarkan pada upaya masing-masing negara tidak akan menghasilkan kesuksesan mutlak karena kriminalitas akibat narkoba terkait dengan Kejahatan Transnasional Terorganisir dan terorisme. Kerja sama internasional yang efektif diperlukan dalam hal ini. Pekerjaan negara yang terus meningkat tentang masalah ini dan tindakan langsung yang mereka ambil untuk memerangi narkoba dipuji dengan baik. Turki juga berkomitmen untuk memerangi narkoba, baik dengan upaya nasional maupun inisiatif yang diambil secara internasional (Özgül, 1999).

B. Perkembangan Perdagangan Narkoba di Turki

Turki merupakan titik transit karena keistimewaannya antara lain letak geografis yang berdekatan yang bersinggungan dengan wilayah Timur dan Barat. Memiliki daerah penghasil di timur sementara daerah konsumen berada di barat - ditambah dengan lewatnya rute ke Balkan melalui Turki – dilihat sebagai masalah yang paling penting, perdagangan narkoba ilegal. Rute perdagangan heroin terbesar di dunia adalah rute Balkan, yang membawa heroin dari Afghanistan ke pasar di Eropa Barat dan Tengah melalui Iran, Turki, dan Balkan. Rute ini menyumbang 58 persen dari penyitaan heroin yang dilakukan di luar Afghanistan pada 2018 (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020). Fluktuasi yang terjadi di wilayah ini telah menyebabkan, munculnya jalur-jalur baru. Peningkatan kemampuan kriminal untuk sindikat narkoba yang baru di republik yang memperoleh kemerdekaan pasca pembubaran Uni Soviet, ditambah dengan krisis yang disebabkan oleh transisi ekonomi seperti itu, telah menyebabkan munculnya kelompok kriminal baru dengan keterlibatan atau kerjasama dengan perdagangan narkoba.

Turki hadir menjadi lalu lintas dari timur ke barat dan sebaliknya, dengan perdagangan tablet sintetis, seperti *Captagon* dan ekstasi, dan prekursornya, terutama zat asetat anhidrida, yang digunakan dalam produksi heroin, dikirim dari kawasan Balkan ke Turki, sedangkan bagi produk murni siap pakai seperti heroin dan morfin, dikirim dari Turki menuju Balkan (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011). Selain obat-obatan yang disebutkan sebelumnya, Turki juga menjadi persimpangan bagi narkoba jenis lain. Mayoritas jaringan narkoba yang masuk ke Turki dari timur dan / atau tenggara adalah jaringan milik organisasi teroris *The Kurdistan Workers' Party/ Partîya Karkerên Kurdistanê* (PKK). Organisasi yang sama memperdagangkan beberapa bagian lain dari narkoba melintasi perbatasan untuk organisasi perdagangan narkoba untuk komisi tertentu. Organisasi perdagangan narkoba, terutama PKK, bertindak sebagai perantara untuk mengangkut 'kargo' ilegal mereka yang dipasok dari negara produsen ke daerah dan pasar konsumen (Özgül, 1999).

1. *The Kurdistan Workers' Party/ Partîya Karkerên Kurdistanê (PKK)*

Jaringan teror PKK telah terlibat dalam semua tahap bisnis narkoba, mulai dari penanaman ganja hingga distribusi heroin di Eropa. Pada beberapa kasus penangkapan PKK beberapa banyak telah terungkap salah satunya bahwa perdagangan narkoba menyediakan sumber keuangan terbesar untuk jaringan teror ini. PKK dan pedagang heroin utama hidup berdampingan di wilayah yang sama dan merekrut anggota dari lingkungan yang sama. Para pelaku PKK memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anggota dan aktivitas jaringan narkoba. Pada tahun-tahun sebelumnya, operator PKK puas dengan pajak tunggal dari para pengedar narkoba. Perpajakan dilakukan dengan dua cara. Pertama, operator PKK mengenakan bea \$ 50 kg per kilogram atau pajak 10% pada pedagang heroin di pos pemeriksaan pabean terlarang yang terletak di perbatasan Turki-Iran (Ekici, 2014). Sedangkan terhadap negara lain dengan komoditas yang sama, PKK menerapkan kebijakan bea masuk ilegal sebesar 7% bagi produk narkoba khusus dari Afghanistan pada setiap pengiriman dari negara tersebut (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Fakta ini dikuatkan dengan pernyataan ratusan anggota PKK dan pengedar narkoba. Kedua, PKK mengenakan pajak tahunan pada jaringan heroin utama secara paksa. Rasio pajak tahunan berubah sesuai dengan skala uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba. Dalam beberapa kesempatan rasio perpajakan meningkat menjadi \$ 2 juta untuk gembong heroin. PKK memainkan peran penting dalam produksi heroin di Iran dan Turki, terutama selama tahun 1990-an. Pasukan keamanan Turki membongkar hampir 20 laboratorium heroin dan menangkap 48 operator PKK yang terlibat dalam pembuatan heroin. Laboratorium PKK terbaru dibongkar di provinsi Hakkari dan total 200 kg heroin yang baru selesai diproduksi disita, sementara empat operator PKK ditangkap di perbatasan Turki-Iran. Selain pembuatan heroin, operator PKK memainkan peran penting dalam pengadaan bahan kimia prekursor. Badan keamanan Turki menyita 26 ton acetic anhydride (AA) dari anggota PKK. Misalnya, pada tahun 2002, dalam kerangka Operasi MATRUSKA, KOM menyita 3,5 ton AA dan menangkap 14 pelaku perdagangan orang bekerja sama dengan DEA dan badan anti narkotika Rusia (Ekici, 2014).

Dalam berbagai kesempatan, para ahli Turki memperkirakan bahwa PKK menghasilkan hampir satu miliar lira (\$ 400 juta) setiap tahun dari penanaman ganja di Turki tenggara dan distribusinya di Turki barat. Badan keamanan Turki menyita ganja dalam jumlah yang semakin meningkat dari para operator PKK. Selain itu, PKK menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan mengendalikan peredaran narkoba. Demikian pula, sejumlah besar operasi anti-narkotika mengungkapkan bahwa operasi PKK memimpin perdagangan narkoba di Turki dan Eropa. Dimulai dengan awal 1990-an, para operator PKK mengoordinasikan distribusi heroin di jalan raya di pasar-pasar utama Eropa. Pasar heroin di Belanda, Jerman dan beberapa bagian Inggris dikendalikan oleh gembong heroin PKK pada pertengahan 1990-an (Ekici, 2014).

Namun PKK sebagai jaringan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Turki tidaklah terlibat secara langsung dalam proses pembukaan jalur perdagangan narkoba di

Turki, namun mereka menerapkan sistem pajak yang telah distandarisasi, guna menghindari resiko menjadi kurir tunggal dalam perjalanan narkoba tersebut sampai destinasi (Shaw & Mangan, 2013). Dengan ketiadaan PKK dalam campur tangan pada perdagangan narkoba ilegal secara eksplisit, maka PKK sebagai entitas politik dapat menjaga citranya, menjadi sebuah institusi, di lain sisi tetap memiliki pemasukan yang besar untuk pembiayaan pemberotakan yang mereka lakukan.

Operasi kontraterorisme melumpuhkan peredaran narkoba PKK karena hampir 11 ton narkoba milik kelompok teroris itu disita oleh aparat keamanan pada tahun 2020. Pasukan keamanan Turki juga telah mendirikan pangkalan di perbatasan Iran dan Irak, di mana perdagangan narkoba oleh kelompok teroris berlangsung gencar. Pangkalan tersebut telah menghentikan teroris dari melakukan segala jenis aktivitas ilegal terutama di provinsi timur Van dan Hakkari. Pasukan keamanan telah menyita 1.560.000 akar ganja sativa dan 5 ton asam anhidrit dalam upaya mereka untuk mengekang kegiatan ilegal PKK di wilayah tersebut. Kelompok teroris, khususnya PKK, telah memperburuk perdagangan narkoba ilegal yang berkembang pesat. Kelompok itu dituduh menyelundupkan narkoba ke dan dari Eropa serta menanam ganja di tenggara Turki sebagai cara untuk mendanai kegiatan ilegalnya (Turkish security forces cause heavy blow to PKK drug trafficking in 2020, 2021).

Pada 2018, Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan kelompok teroris PKK menguasai 80% perdagangan narkoba di Eropa, menghasilkan sekitar \$ 1,5 miliar setiap tahun. Van telah menjadi provinsi terdepan dalam hal penyitaan narkoba pada tahun 2020 karena lebih dari 5 ton heroin telah disita di provinsi tersebut, serta 732 kilogram obat-obatan sintetis, lebih dari satu ton mariyuana, 1.560.000 akar cannabis sativa dan 254 kilogram opium. Dari 1.735 tersangka yang diduga terkait dengan peredaran narkoba di Van, 342 di antaranya ditangkap. Sebaliknya, di Hakkari, 2,5 ton heroin disita pada tahun 2020, serta 500 kilogram ganja dan 5 ton asam anhidrit (Turkish security forces cause heavy blow to PKK drug trafficking in 2020, 2021).

2. Kelompok yang berlatarbelakang keluarga yang sama (Klan)

Wilayah Turki yang strategis sebagai jembatan perdagangan narkoba ilegal tidak hanya dimanfaatkan oleh Kejahatan Transnasional Terorganisir saja, namun juga oleh suatu kelompok dengan latar belakang keluarga yang sama yang bermukim di suatu wilayah bersama-sama (klan) juga turut memanfaatkan besarnya tingkat perdagangan narkoba ilegal. Klan tersebut memiliki peranan penting dalam membagi jalur distribusi guna mengurangi potensi penangkapan oleh otoritas Turki dalam upayanya membasmi perdagangan narkoba ilegal. Jaringan yang dibentuk oleh klan tersebut akan membentuk suatu grup kecil di setiap wilayah yang disebut kartel. Dengan adanya grup kecil di tiap-tiap wilayah yang menjadi jalur perdagangan, rantai distribusi tetap mampu terpenuhi ke negara peminat dikarenakan klan tidak mudah diketahui pergerakannya (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011).

Klan biasa dipimpin oleh seorang *baba* (sesepuh/tetua) dalam klan tersebut yang biasanya orang yang dihormati dan tertua dalam keluarga tersebut. Namun di era kontemporer, penggunaan istilah *baba* tidak lagi terbatas merujuk pada tetua saja, tapi

juga dapat digunakan pada ketua sindikat jaringan kejahatan. Pada zaman yang lebih modern, klan beroperasi secara lebih terorganisir dengan membentuk jaringan sementara, guna menghindari kecurigaan otoritas terkait. Budaya klan yang berasal dari sistem kekeluargaan, di masa kini telah bertransformasi menjadi suatu kelompok yang berorientasi pada bisnis dan keuntungan.

Salah satu klan terbesar dalam sejarah perdagangan narkoba ilegal kontemporer adalah klan Baybasin yang bergerak dalam perdagangan heroin lintas Eropa. Klan Baybasin memulai aktivitas perdagangan heroin pada tahun 1970 di sekitar perbatasan Suriah, dan menjadi salah satu klan terbesar di Eropa yang bergerak di bidang perdagangan heroin. Baybasin adalah salah satu contoh jaringan tersukses yang mampu membentuk rantai distribusi hingga London, dan bekerja sama dengan kelompok imigran Turki dalam pengedaran narkoba tangan terakhir (Galeotti, 2012). Gambaran Pola penyelundupan Baybasin di negara Eropa yaitu dengan memaksa dan mengancam para pemuda komunitas Turki dan Kurdi di Negara tersebut agar bekerja untuk mereka dan kemudian memberikan senjata dan uang yang dipasok langsung oleh keluarga Baybasin. Aktivitasnya ini berlangsung di beberapa negara seperti Inggris, Jerman dan Belanda. keluarga Baybasin diduga melakukan operasi penyelundupan heroin yang ekstensif di Turki, Italia, dan Spanyol (Carlson, B. G, 2005).

Transformasi preferensi klan yang bergerak dalam perdagangan narkoba ilegal di Turki dari menjadi pihak produsen menjadi pihak penjual berawal dari adanya kebijakan Turki pada 1970 untuk membasmi produksi opium (Whitaker, 1987). Dengan adanya kebijakan tersebut, produksi opium berkurang drastis di Turki, namun posisi Turki yang sangat penting dalam jalur transit dimanfaatkan oleh klan yang semula menjadi pihak produksi dan mulai membentuk rantai distribusi dari negara produsen opium seperti dari kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Thailand).

Sejak adanya peristiwa tersebut, terdapat jaringan baru yang menjadi ancaman bagi keamanan Eropa, dengan adanya klan baru dari Turki yang bergerombol beralihfungsi dari menjadi produsen menjadi penjual, terjadi Diversifikasi dalam perdagangan narkoba ilegal di Eropa. Kehadiran jaringan baru telah memperkuat koneksi jaringan perdangan narkoba internasional dalam jalur distribusinya dari negara-negara produsen, pembukaan pasar produsen baru di negara-negara Asia, yang jumlah distribusinya tidak sebesar saat Turki masih menjadi negara produsen, telah menyediakan komoditas narkoba lebih besar daripada sebelumnya di Eropa.

Dari Data dan penjelasan tersebut Terlihat bahwa adanya Kejahatan Transnasional Terorganisir yaitu penjualan narkoba illegal di Turki masih sangat masif dan kelompok-kelompoknya terorganisir seperti PKK sampai warga lokal masih sangat memiliki pengaruh diwilayah Turki dan pergerakannya dalam menyelundupkan narkoba Ke Eropa ataupun Timur tengah masih belum dapat dihentikan oleh Pemerintah Turki. Namun, beberapa langkah upaya telah diambil oleh Pemerintah Turki yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

C. Upaya Pemerintah Turki dalam menyelesaikan Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

Dalam upaya menangani dan memberantas perdagangan narkoba ilegal, pemerintah Turki telah memberikan pembagian tugas kepada lembaga-lembaga negara seperti; di bawah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keamanan adalah badan operasional utama untuk penegakan narkoba di Turki. Komando Jenderal *Gendarmerie* dan Komando Penjaga Pantai, Direktorat Jenderal Kefarmasian Kementerian Kesehatan menetapkan tata cara penggunaan obat dan psikotropika untuk tujuan medis, mengatur izin pengendalian bahan kimia dan psikotropika yang diimpor secara legal, dan mengatur tata cara pengobatan pecandu. Dewan biji-bijian Turki dari Kementerian Pertanian dan Urusan Desa ditugaskan untuk mengawasi penanaman berlisensi; menerbitkan lisensi; pembuatan kebijakan pembelian hasil budidaya, pengoperasian pabrik Alkaloid Afyon, dan pelaksanaan transaksi ekspor, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Penjaga Bea Cukai Wakil Menteri Bea Cukai bertugas memberantas peredaran narkoba ilegal di Turki. Dan juga mereka diberi wewenang melakukan intersepsi, penyelidikan, dan penuntutan atas segala tindakan penyelundupan, termasuk narkoba, di dalam wilayah Bea Cukai Turki (Özgül, 1999).

Selain pembagian tugas, Turki juga telah mengalokasikan sumber daya nasional yang besar untuk melawan perdagangan narkoba dan prekursor. Polisi Nasional Turki, *Gendarmerie*, Penjaga Pantai, dan otoritas Bea Cukai terus berhasil menyita sebagian besar perdagangan narkoba melalui wilayah Turki. Dalam 2019, lebih dari 20 ton heroin, 90,5 ton mariyuana, 1,6 ton kokain, 1042 kilogram metafetamin, 710 kilogram cannabinoïd, 803 liter asetat anhidrida, 11 juta *captagon* dan 8,6 juta tablet ekstasi telah disita. Peralatan teknologi baru dan sistem pengawasan juga dikembangkan dan digunakan oleh otoritas terkait untuk memerangi secara lebih efektif kegiatan terkait obat-obatan terlarang (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020).

Pemerintah Turki juga mengadopsi strategi penanggulangan narkoba dan rencana aksi untuk tahun 2018-2023 dan juga membentuk Dewan Tinggi untuk mengurangi ketergantungan narkoba, di bawah naungan Kepresidenan Republik Turki. Strategi ini didasarkan pada pendekatan yang seimbang dan komprehensif. Rencana aksi terdiri dari langkah-langkah yang menargetkan pengurangan permintaan dan penawaran dalam kerangka kerja nasional yang terkoordinasi. Di bidang pencegahan, kemitraan pemerintah-masyarakat sipil yang efektif dan berhasil dikembangkan. Masyarakat Bulan Sabit Hijau Turki dan LSM lain telah mengambil peran penting dalam bidang ini. Mereka bersedia bekerja sama dengan LSM serupa dari negara mitra lainnya (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020).

Fakta bahwa kejahatan ini bersifat transnasional yang melibatkan beberapa negara maka dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerja sama. Perjanjian bilateral untuk kerja sama melawan perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir juga memiliki kepentingan yang signifikan. Turki telah menyelesaikan perjanjian semacam itu dengan lebih dari 70 negara. Turki juga merupakan pihak dalam upaya kerja sama regional tertentu dalam memerangi kejahatan terorganisir di kawasan Balkan dan Laut

Hitam, seperti Pakta Stabilitas, Prakarsa Koperasi Eropa Tenggara (SECI), Kerjasama Ekonomi Laut Hitam (BSEC). Selain itu, "Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Polisi Eropa (EUROPOL) dan Republik Turki mulai berlaku sejak Juli 2004.

Kemudian, sebagai negara yang telah mencapai kesuksesan besar dalam memerangi kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba, Turki telah memimpin inisiatif nasional yang bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur untuk melakukan upaya di tingkat internasional. Dalam kerangka ini, *Turkish International Academy Against Drugs and Organized Crime* (TADOC) telah dibentuk di Turki dengan kerja sama dengan *the United Nations Office on Drugs and Crime*. TADOC, dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan kondisi perang melawan kelompok kriminal terorganisir berdasarkan pada data ilmiah telah menyiapkan dasar yang tepat untuk membangun dan membina kerjasama regional dan internasional dengan membangun jaringan dalam memerangi kejahatan dengan mengintegrasikan peserta pelatihan dari berbagai instansi dari berbagai negara. Sejak didirikan pada tahun 2000, lebih dari 1600 aparat penegak hukum nasional dan internasional telah berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh TADOC.

Kesimpulan

Kejahatan Transnasional Terorganisir telah menjadi perhatian serius bagi seluruh komunitas global. Berbagai macam kejahatan transnasional terus berkembang sampai saat ini salah satunya perdagangan narkoba secara ilegal. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki ancaman yang tinggi atas kejahatan perdagangan narkoba ilegal karena secara geografis Turki merupakan tempat transit antara Timur dan Barat. Turki telah menjadi salah satu rute yang dilalui kelompok kejahatan terorganisir untuk mengangkut barang-barang terlarang. Layaknya sebuah jembatan antara negara-negara produsen bahan ilegal di Timur dan konsumen di Barat. Hal ini tentu juga menjadi permasalahan yang dirasakan bukan hanya Turki tetapi negara-negara yang menjadi sasaran atau tujuan utama pengiriman narkoba ilegal tersebut.

Dalam perkembangannya berbagai aktor pelaku perdagangan illegal mulai bermunculan dan semakin besar, beberapa diantaranya yaitu klan Baybasin dan Jaringan teror PKK yang telah terlibat dalam semua tahap bisnis narkoba, mulai dari penanaman ganja hingga distribusi heroin di Eropa. Klan Baybasin yang bergerak dalam perdagangan heroin lintas Eropa telah memulai aktivitas perdagangan heroin pada tahun 1970 di sekitar perbatasan Suriah, dan menjadi salah satu klan terbesar di Eropa yang bergerak di bidang perdagangan heroin. Baybasin adalah salah satu contoh jaringan tersukses yang mampu membentuk rantai distribusi hingga London, dan bekerja sama dengan kelompok imigran Turki dalam pengedaran narkoba tangan terakhir. Selain itu ada juga Jaringan PKK yang telah beroperasi dengan memimpin perdagangan narkoba di Turki dan Eropa. Dimulai dengan awal 1990-an, para operator PKK mengoordinasikan distribusi heroin di jalan raya di pasar-pasar utama Eropa. Pasar heroin di Belanda, Jerman dan beberapa bagian Inggris dikendalikan oleh sel heroin PKK pada pertengahan 1990-an.

Berbagai macam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah telah dilakukan oleh pemerintah Turki, seperti pembagian tugas yang fokus pada penyelesaian permasalahan perdagangan ilegal narkoba kepada lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kapasitasnya serta telah membuat perjanjian bilateral untuk kerja sama melawan perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir juga memiliki kepentingan yang signifikan. Turki telah menyelesaikan perjanjian semacam itu dengan lebih dari 70 negara.

Bibliografi

- Athanassopoulou, E. (2005). *Turkey - Anglo-American Security Interests, 1945-1952 The First Enlargement of NATO*. London: Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications.
- Carlson, B. G. (2005). Huseyin Baybasin -- Europe's Pablo Escobar. *SAIS Review*, 25(1), 69–70. doi:10.1353/sais.2005.0004
- Ekici, B. (2014). International Drug Trafficking and National Security of Turkey. *Journal of Politics and Law*, 7(2), 113-126.
- Galeotti, M. (2012). Turkish Organised Crime: From Tradition to Business. In D. Siegel, & H. van de Bunt, *Traditional Organized Crime in the Modern World Responses to Socioeconomic Change* (pp. 49-68). New York: Springer.
- Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia. (2019). *Transnational Crime*. Retrieved from Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
- Mittleman, J. H., & Johnston, R. (1999). The globalization of organized crime, the courtesan state, and the corruption of civil society. *Global Governance*, 5(1), 103-126.
- Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2016). *The nexus of conflict and illicit drug trafficking Syria and the wider region*. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Özgül, M. Y. (1999). An Overall Assessment Of Transnational Organized Crime. *108th International Seminar*, (pp. 181-194).
- Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2021). *Turkey's Efforts In Combating Organized Crime*. Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-efforts-in-combating-organized-crime.en.mfa
- Shaw, M., & Mangan, F. (2013). *Profits and Losses: Illicit economies and emerging patterns of organised crime as obstacles to peace and state consolidation in Libya*. Washington DC: United States Institute of Peace.
- Toktas, S., & Selimoglu, H. (2012). Smuggling and Trafficking in Turkey: An Analysis of EU-Turkey Cooperation in Combating Transnational Organized Crime. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 14(1), 135-150. doi:10.1080/19448953.2012.656970
- Turkish security forces cause heavy blow to PKK drug trafficking in 2020*. (2021,

January 18). Retrieved from Daily Sabah:
<https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkish-security-forces-cause-heavy-blow-to-pkk-drug-trafficking-in-2020>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2011). *The Global Afghan Opium Trade A Threat Assessment*. Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Drug trafficking*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *STATEMENT of the REPUBLIC of TURKEY 63rd CND 2-6 March 2020*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63/Statements63_02.03.2020/Country_02.03.2020/Turkey.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *World Drug Report*. United Nation publication, Sales No. E.20.XI.6.

Whitaker, B. (1987). *The global connection*. London: Jonathan Cape.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.